

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG
NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS JABATAN
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dengan adanya penambahan kendaraan roda empat serta untuk menjamin tertibnya pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas, maka perlu menetapkan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Jabatan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Jabatan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS JABATAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai penanggung jawab kendaraan dinas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang digunakan untuk kepentingan dinas menjadi tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. kerusakan kendaraan dinas jabatan yang disebabkan karena penggunaan di luar kepentingan dinas maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU
PENGGUNA BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG
TENTANG PENANGGUNG JAWAB
KENDARAAN DINAS JABATAN PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 115

TANGGAL : 15 April 2020

**PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS JABATAN
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	PENANGGUNG JAWAB	JABATAN	KENDARAAN			KETERANGAN
			JENIS	MERK/TIPE	NOMOR POLISI	
1	Roni Dwi Susanto	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1421 SQA	Kendaraan Dinas Jabatan
2	Setya Budi Arijanta	Sekretaris Utama	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1423 SQA	Kendaraan Dinas Jabatan
3	Sarah Sadiqa	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1424 SQA	Kendaraan Dinas Jabatan
4	Salusra Widya	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1427 SQA	Kendaraan Dinas Jabatan

No.	PENANGGUNG JAWAB	JABATAN	KENDARAAN			KETERANGAN
			JENIS	MERK/ TIPE	NOMOR POLISI	
5	Robin Asad Suryo	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1422 SQA	Kendaraan Dinas Jabatan
6	Ikak Gayuh Patriastomo	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1426 SQA	Kendaraan Dinas Jabatan
7	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana	Roda 4	Toyota/Innova	B 1963 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
8	Hermawan	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Roda 4	Fortuner 2.4 VRZ TRD	B 2072 SJB	Kendaraan Dinas Jabatan
9	Iwan Herniwan	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian	Roda 4	Toyota/Innova	B 1953 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
10	Fadli Arif	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Roda 4	Toyota/Innova	B 1958 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
11	R. Fendy Dharma Saputra	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Roda 4	Toyota/Innova	B 1959 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
12	Gatot Pambudhi Poetranto	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Roda 4	Toyota/Innova	B 1954 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
13	Sutan Suangkupon Lubis	Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	Roda 4	Toyota/Innova	B 1961 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
14	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Roda 4	Fortuner 2.4 VRZ TRD	B 2109 SJB	Kendaraan Dinas Jabatan
15	Emin Adhy Muhaemin	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Roda 4	Toyota/Innova	B 1955 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan

No.	PENANGGUNG JAWAB	JABATAN	KENDARAAN			KETERANGAN
			JENIS	MERK/TIPE	NOMOR POLISI	
16	Tatang Rustandar Wiraatmadja	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Roda 4	Toyota/Innova	B 1962 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
17	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Direktur Sertifikasi Profesi	Roda 4	Toyota/Innova	B 1956 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
18	Yulianto Prihhandoyo	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	Roda 4	Fortuner 2.4 VRZ TRD	B 2179 SJB	Kendaraan Dinas Jabatan
19	Muhammad Aris Supriyanto	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	Roda 4	Toyota/Innova	B 1960 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
20	Patria Susantosa	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Roda 4	Toyota/Innova	B 1957 SQP	Kendaraan Dinas Jabatan
21	Jhon Piter Halomoan Situmorang	Inspektur	Roda 4	Fortuner 2.4 VRZ TRD	B 2143 SJB	Kendaraan Dinas Jabatan
22	Suharti	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Roda 4	Fortuner 2.4 VRZ TRD	B 2110 SJB	Kendaraan Dinas Jabatan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU
PENGGUNA BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO